

Pendampingan Akuntansi dan Pajak Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se – Kabupaten Bojonegoro

Tumirin, Abdullah Mujaddid, Anwar Hariyono, dan Suwandi

Universitas Muhammadiyah Gresik

tumirin@umg.ac.id

Korespondensi

Tumirin

Abstract :

The purpose of community service is to conduct training, assistance in the preparation and preparation of financial and taxation reports at the Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) throughout Bojonegoro Regency. The method of implementing the activity is to conduct training and face-to-face meetings by presenting presenters. The activity will be held on 31 October 2019. The training results show that there are still many institutions that have not prepared financial reports in accordance with generally accepted accounting standards. Most still use cash statements only. Financial personnel still need further assistance. Most tax reports have not yet been made and reported.

Keywords : Accounting, Tax, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

Abstrak :

Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melakukan pelatihan, pendampingan dalam penyusunan, dan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) Se – Kabupaten Bojonegoro. Metode pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan pelatihan dan pertemuan tatap muka dengan menghadirkan pemateri. Kegiatan akan dilaksanakan pada Tanggal 31 Oktober 2019. Hasil pelatihan menunjukkan masih banyak lembaga yang belum Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standart akuntansi yang berlaku umum. Kebanyakan masih menggunakan laporan kas saja. Personil keuangan masih membutuhkan bantuan lebih lanjut. Sebagian besar laporan perpajakan belum dibuat dan dilaporkan.

Kata Kunci : Akuntansi, Perpajakan, Amal Usaha Muhammadiyah (AUM)

Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkan [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018](#) tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Nomor). Hal tersebut berdampak bahwa setiap pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan yang melakukan usaha wajib melakukan pendaftaran atau memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Peraturan tentang keharusan memiliki NIB tersebut berlaku untuk semua lembaga, baik bisnis atau non bisnis. Termasuk dalam hal ini adalah lembaga muhammadiyah terutama amal usahanya.

Semua amal usaha muhammadiyah (AUM) harus juga memiliki NIB. Amal usaha tersebut seperti Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan usia Dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi, lembaga kesehatan, bahkan lembaga sosial. Dampak lanjutan dari kepemilikan NIB tersebut adalah keharusan lembaga untuk melaporkan perpajakan ke kantor pajak. Pelaporan perpajakan ke kantor pajak merupakan kegiatan yang memerlukan dukungan data-data seperti laporan keuangan, laporan SPT dan lain-lain.

Kegiatan pelaporan perpajakan dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia masih jarang dilakukan di sebagian besar Amal Usaha Muhammadiyah. Permasalahan (AUM) berdasarkan hasil data dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro didapat bahwa masih sebagian besar Amal Usaha muhammadiyah (AUM) dalam pengelolaannya masih belum memahami dengan baik tentang Perpajakan dan Akuntansi terutama bagaimana menyusun laporan keuangan dan Pajak termasuk juga dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja untuk lampiran laporan pajak (Putra, 2020).

Sebagai dasar dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan sekolah muhammadiyah yang dikeluarkan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur tahun 2011. Buku pedoman ini berisi tentang Pedoman manajemen keuangan dan pedoman teknis pengelolaan keuangan sekolah ini. Selain itu juga dikemukakan contoh-contoh dalam lampiran tersendiri. Harapannya, agar buku ini dapat dijadikan pedoman yang benar-benar praktis bagi sekolah Muhammadiyah. Semangat yang ingin dikedepankan melalui buku pedoman ini adalah terjalannya

hubungan yang harmonis antara sekolah dan persyarikatan Muhammadiyah.

Pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan perpajakan dan penyusunan laporan keuangan kepada semua amal usaha muhammadiyah. Pendampingan dilakukan untuk: (1) Pendidikan Usia Dini (PAUD) /Taman Kanak-kanak (TK): dengan permasalahan; (2) Sekolah dasar; (3) Sekolah tingkat Menengah Pertama (SMP); Sekolah menengah umum/kejuruan (SMU/K); Lembaga Kesehatan, seperti klinik dan rumah sakit; Panti asuhan dan panti jompo. Masalahnya antara lain: (a) NPWP yang masih menggunakan nama yayasan; (b) Tidak Pernah lapor pajak; (c) Tidak bayar pajak; (d) dan tidak membuat laporan keuangan; (e) tidak punya NPWP.

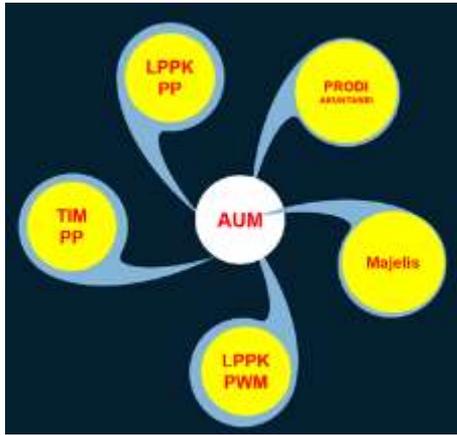
Metode Pelaksanaan

Adapun jadwal rencana kegiatan pengabdian masyarakat bagi karang taruna dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan

No	Jenis Kegiatan
1	Observasi dan melakukan koordinasi dengan pengurus PDM dan PDA Bojonegoro
3	Melakukan pemetaan AUM sesuai dengan kelompok-kelompok tertentu
4	Melaksanakan Pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pajak.
6	Pendampingan kepada AUM tentang pajak, akuntansi dan pelaporan keuangan AUM
7	Evaluasi program yang telah dijalankan
8	Penyusunan Laporan dan publikasi program pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat dengan target sasaran Amal Usaha Muhammadiyah di seluruh Kabupaten Bojonegoro dan seluruh lembaga yang terkait. Lembaga yang terkait tersebut adalah Pimpinan daerah, lembaga Pembina dan pengawas keuangan, majelis kesehatan, majelis pendidikan, majelis sosial, baik di pimpinan daerah, wilayah dan pusat, seperti yang tergambar dibawah ini:



Gambar 1. Partisipasi Mitra

Personalia tim pengabdian masyarakat tentang kegiatan pendampingan akuntansi, penyusunan laporan keuangan, dan perpajakan dilakukan oleh tim dari prodi akuntansi yang terdiri dari 4 orang, seperti yang dijabarkan di tabel berikut ini:

Tabel 2. Kelayakan Personalia

No.	Nama	Kompetensi
1.	Dr. Tumirin, S.E., M.Si,	Akuntansi dan Keuangan
2.	Anwar Haryono, S.E., M.Si.	Akuntansi dan Keuangan
3.	Suwandi, S.E., M.Si.	Akuntansi dan Keuangan
4.	Abdullah Mujaddid, S.E., M.M.	Akuntansi dan Pajak

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2019. Tempat pelaksanaan kegiatan dilakukan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro di Jalan Teuku Umar No.48 B, Kadipaten, Bojonegoro, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur 62111. Peserta kegiatan adalah bagian keuangan amal usaha muhammadiyah Kabupaten Bojonegoro. Jumlah peserta adalah 182 orang peserta.

Hasil dan Pembahasan

a. Panduan Laporan Keuangan Sekolah

Karakteristik organisasi non profit / nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut (IAI, 2011).

b. Form Anggaran Sekolah

Laporan keuangan untuk organisasi nirlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk organisasi bisnis pada umumnya (IAI, 2011). Sebelum proses pembuatan laporan keuangan lembaga non profit/nirlaba, maka institusi harus membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). RAPB tersebut merupakan acuan aktivitas yang akan dilaksanakan selama satu tahun anggaran. Form RAPB tersebut seperti digambarkan pada gambar 2.

No	Uraian	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah
BOGDA JANUARI-JUNI					
1	Pengembangan kompetensi kelulusan				8.800.000
TOTAL					
2	Pengembangan standart ilmi				
TOTAL					
3	pengembangan standart proses				
pengembangan perpustakaan					
	Buku Mebel	482	Ln	250	113.000
TOTAL					
4	Pengembangan pedidik & tenaga kependidikan				113.000
kegiatan/operasi/pendidikan					
	kegiatan/operasi/pendidikan	1	sm	1.952.000	1.952.000
TOTAL					
5	pengembangan sarana & prasarana				
anggaran tetap & jasa					
	biaya gaji	1	bulan	50.000	50.000
	biaya honor	1	bulan	50.000	50.000

Gambar 2. Form Anggaran Sekolah

c. Form Realisasi Keuangan

Laporan realisasi keuangan merupakan laporan realisasi dari rencana anggaran pendapatan pada satu periode. Laporan ini terdiri dari realisasi pendapatan dan pengeluaran yang disesuaikan dengan kelompok RAPB. Laporan realisasi keuangan seperti terlihat pada gambar 3 dibawah ini:

LAPORAN REALISASI KEUANGAN				
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PENGADAMPING (BOGDAM)				
PERIODE JULI-DESEMBER				
NO	KOMPONEN KEGIATAN	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO
1	PENERIMAAN BOGDAM	Rp. 8.800.000,00		
II	PENGELUARAN			
1	1) mendukung peningkatan mutu PBM			
	a. biaya ATK		Rp. 113.000,00	
	b. biaya pengabdian			
2	2) mendukung pembinaan dan pengembangan kearsifan			
	2) mendukung sarana & prasarana/lingkungan sekolah/ruang			
	a. biaya listrik		Rp. 300.000,00	
	b. pengalihan sarana & prasarana / fasilitas sekolah		Rp. 677.000,00	
	c. biaya telepon			
4	4) mendukung peningkatan mutu PTK			
	a. gaji/biaya pegawai tetap tetap		Rp. 8.800.000,00	
	b. biaya sarman/kegiatan/kegiatan pendidikan		Rp. 1.952.000,00	
5	5) pengembalian kelebihan dana BOGDAM			
	5) sisa x Rp 50.000 x 6 bulan		Rp. 600.000,00	
	JUMLAH	Rp. 8.800.000,00	Rp. 8.800.000,00	Rp. -

Gambar 3. Form Realisasi Keuangan

d. Form Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, memberikan informasi yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas, dan

koneksi antara aktiva dan kewajiban. Informasi umumnya disajikan dengan pengumpulan aktiva dan kewajiban yang memiliki karakteristik serupa dalam suatu kelompok yang relatif homogen.

Organisasi umumnya melaporkan masing-masing unsur aktiva dalam kelompok yang homogen, seperti: a) kas dan setara kas; b) piutang, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain; c) persediaan; d) sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka; e) investasi jangka panjang; f) tanah, gedung, peralatan, serta aktiva tetap lainnya yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kas atau aktiva lain yang dibatasi penggunaannya oleh penyumbang harus disajikan terpisah dari kas atau aktiva lain yang tidak terikat penggunaannya (IAI, 2011). Form laporan posisi keuangan seperti yang terlihat pada gambar 4.

SMA XXXXX BOJONEGORO	
LAPORAN POSISI KEUANGAN	
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL	
31 DESEMBER 2020	
AKTIVA	RUPIAH
Aset Lancar	
Kas Setara Kas	29.880.000,00
Investasi Jangka Pendek	0,00
Piutang Usaha	0,00
Piutang Lain-lain	0,00
Uang Muka	0,00
	29.880.000,00
Aset Tidak Lancar	
Aset Tetap (Bersih)	2.271.767.975,00
	2.271.767.975,00
TOTAL AKTIVA	2.301.647.975,00
PASIVA	
Liabilitas Lancar	
Utang Usaha	0,00
Utang Lain-lain	0,00
Pendapatan diterima dimuka	0,00
	0,00
Liabilitas Tidak Lancar	
Utang Jk. Panjang	0,00
	0,00
Aktiva bersih	
Aktiva bersih	2.301.647.975,00
Selisih lebih (kurang) dana Tahun ini	0,00
	2.301.647.975,00
TOTAL PASIVA	2.301.647.975,00
Gresik, 31 Desember 2020	

Gambar 4. Laporan Posisi Keuangan

e. Form Laporan Aktivitas

Tujuan laporan aktivitas yaitu menyediakan informasi tentang (a) transaksi dan peristiwa yang mengubah nilai dan aktiva bersih, (b) koneksi antar transaksi, dan kejadian lain, dan (c) bagaimana sumber daya dalam kegiatan berbagai program atau jasa, Informasi dan laporan aktivitas digunakan bersama dengan pengungkapan informasi di laporan keuangan, untuk membantu para penyumbang dana,

anggota/pengurus organisasi, dan pihak lainnya untuk (a) untuk evaluasi kinerja pada suatu periode, (b) menilai usaha, kemampuan, dan keberlanjutan organisasi dan memberikan jasa, dan (c) menilai kegiatan tanggung jawab dan kinerja Amal Usaha Muhammadiyah.

Klasifikasi pendapatan, beban, defisit dan surplus dalam kelompok aktiva bersih tidak menutup peluang perlunya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan belanja secara bruto. Pendapatan investasi dapat disajikan secara bersih dengan syarat belanja-belanja terkait, seperti beban penitipan dan beban penasihat investasi, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan aktivitas yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan surplus (defisit) seperti terlihat pada gambar 5.

SMK XXXXX BOJONEGORO	
LAPORAN PENDAPATAN, BEBAN, AKTIVA BERSIH	
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL	
31 DESEMBER 2016	
KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
PENERIMAAN	
Penerimaan iuran sekolah	10.080.000
Penerimaan Sumbangan	0
Sumbangan (Bantuan Operasional Sekolah Pemandu)	19.800.000
Aset neto yg berakhir pembatasannya	0
Penerimaan Pondok	0
	Total Penerimaan
	29.880.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Gaji dan Kesejahteraan	-15.270.000
Beban Umum dan Kantor	-5.712.650
Beban Kurikulum	0
Beban Kesiswaan	-1.980.000
Beban Ismuba	0
Beban Kesekretariatan	0
Beban Sistem Manajemen & Keuangan	0
Beban Pengembangan IT & Litbang	0
Beban Humas	0
Beban Sarana Prasarana	-6.917.350
Beban Depresiasi	0
Beban Sumbangan & Bantuan	0
Beban Lain-lain	0
Beban Pondok	0
	Total Biaya
	-29.880.000
NAIK (TURUN) DANA TDK TERIKAT :	0
KENAIKAN (PENURUNAN) DANA TERIKAT	
Penerimaan dana terikat temporer	
Penerimaan operasional	0
Bantuan dan sumbangan	0
Penerimaan lain-lain	0
Aset neto yg berakhir pembatasannya	0
	0
	0
Penerimaan dana terikat permanen	
Bantuan dan sumbangan	0
Penerimaan lain-lain	0
	0
NAIK (TURUN) DANA SBLM PAJAK	0
BEBAN PAJAK	
Pajak Penghasilan	0
SURPLUS (DEFISIT) :	0

Gambar 5. Laporan Aktivitas

f. Form Realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Laporan realisasi dana BOS adalah laporan

realisasi penggunaan dana yang berasal dari bantuan pemerintah. Laporan ini memiliki standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Format laporan dan komponen penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Penggunaan dana ini digunakan untuk pengembangan potensi sesuai standar yang ditentukan. Form laporan bantuan dana BOS seperti yang terlihat pada gambar 6.

Gambar 6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana BOS

g. Form Realisasi Dana BPOP

Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di sekolah adalah program Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur melalui program Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Cerdas dan Sehat yang dengan penyediaan dana biaya penunjang operasional untuk personalia dan nonpersonalia bagi SMA, SMK dan Sekolah Khusus Negeri dan Swasta yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Disdik, 2020).

Tujuan BPOP adalah: 1) Untuk membantu dana biaya operasional sekolah, yaitu personalia maupun non-personalia; 2) Meringankan beban operasional sekolah bagi peserta didik di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah maupun masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas proses belajar di sekolah. Form laporan penggunaan BOPO sebagaimana terlihat di gambar 7.

Gambar 7. Laporan Realisasi BPOP

h. Laporan Rekapitulasi Penggunaan Dana SPP

Dana SPP singkatan dari sumbangan pembinaan pendidikan (DEPDIKNAS, 2008). Dana tersebut berasal dari partisipasi orang tua/wali murid di instansi pendidikan. Sumbangan tersebut

digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Pengelompokan laporan penggunaan dana SPP sama dengan pengelompokan dana BOS. Form laporan penggunaan dana SPP seperti terlihat pada gambar 8 dibawah ini:

Gambar 8. Form Laporan Realisasi Penggunaan SPP

Kesimpulan dan Saran

Pelatihan dan pendampingan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan merupakan kegiatan yang masih harus terus dilakukan. Berdasarkan evaluasi kegiatan, masih banyak sekali pengelola sekolah yang masih banyak yang belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku umum. Sebagian besar mereka hanya menyusun laporan realisasi anggaran. Namun masih banyak yang belum mampu menyusun laporan posisi keuangan.

Laporan keuangan yang meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan aset bersih, laporan arus kas adalah standar laporan yang diperlukan oleh organisasi non profit/nirlaba. Apalagi saat ini semua institusi harus melaporkan perpajakan. Maka pendampingan penyusunan laporan keuangan dan perpajakan masih perlu untuk diteruskan.

Referensi

DEPDIKNAS, R. I. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa-4/E*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Disdik, J. (Producer). (2020, 17/07/2020). Tentang Program BPOP. Retrieved from <https://bpopp.disdikjatim.com/>.

IAI. (2011). *Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (PSAK No. 45)*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Nomor, P. P. R. I. Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Putra, W. M. (2020). *Pendampingan Penyusunan pedoman Tata Kelola Anggaran Keuangansd SMP Muhammadiyah di Kota Yogyakarta*. Prosiding, 9(1).